

Transformasi Estetika dan Makna Ruang Publik: Studi Pantai Parkit Padang Pasca Banjir 2025

Ghina Asyifa Rahmadani¹, Aulia Nabila Sarweni², Avisenna Jemika³,
Aliya Rhamadani⁴, Aulia Agustina W⁵, Delmira Syafrini^{6*}

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: delmirasyafrini@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi estetika dan makna ruang publik Pantai Parkit Padang pasca bencana *galodo* (banjir bandang) yang terjadi pada November 2025. Penelitian ini penting dilakukan mengingat bencana tersebut menyebabkan perubahan morfologi pesisir yang ekstrem, termasuk terbentuknya pulau baru akibat sedimentasi dan mundurnya garis pantai, sehingga mendorong perubahan signifikan dalam cara masyarakat memandang, menggunakan, dan memaknai ruang publik tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus yang dilaksanakan di Pantai Parkit, Kota Padang pada tahun 2026. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Informan dipilih secara *purposive sampling* sebanyak enam orang, terdiri dari empat pengunjung, satu pelaku UMKM, dan satu masyarakat lokal. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir 2025 mengubah kondisi fisik, sosial, dan ekonomi kawasan secara bersamaan: kondisi kebersihan menurun akibat tumpukan kayu dan sampah plastik, namun terbentuknya pulau baru justru melahirkan daya tarik wisata baru yang meningkatkan keragaman pengunjung. Perubahan ini turut memengaruhi pola penggunaan ruang publik, memunculkan solidaritas sekaligus konflik pemanfaatan sumber daya, serta mendorong adaptasi ekonomi bagi pelaku UMKM. Yang menarik dari penelitian ini adalah bagaimana sebuah bencana alam secara paradoks tidak hanya merusak, tetapi juga menciptakan makna ruang publik baru yang berbasis fenomena geomorfologis unik di tengah masyarakat urban pesisir.

Kata Kunci: Estetika pantai; Galodo; Pantai Parkit Padang; Pascabencana.

Abstract

This study aims to examine the aesthetic transformation and meaning of the public space of Parkit Beach, Padang, after the Galodo disaster (flash flood) that occurred in November 2025. This research is important to conduct considering that the disaster caused extreme changes in coastal morphology, including the formation of new islands due to sedimentation and shoreline retreat, thus driving significant changes in how people view, use, and interpret the public space. The study uses a qualitative approach with a case study type conducted at Parkit Beach, Padang City in 2026. Data collection was carried out through in-depth interviews, field observations, and documentation, with data validity testing using source and method triangulation. Informants were selected using purposive sampling of six people, consisting of four visitors, one MSME actor, and one local community. Data analysis used the Miles and Huberman model. The results of the study show that the 2025 flood changed the physical, social, and economic conditions of the area simultaneously: cleanliness conditions decreased due to piles of wood and plastic waste, but the formation of new islands actually gave birth to new tourist attractions that improved visitor welfare. These changes also influence patterns of public space use, generating both solidarity and conflict over resource use, and encouraging economic adaptation for MSMEs. What's interesting about this research is how a natural disaster paradoxically not only destroys but also creates new meanings for public space based on unique geomorphological phenomena within coastal urban communities.

Keywords: Coastal aesthetics, Flash flood, Parkit Padang beach; Post-disaster.

How to Cite: Rahmadani, G. A. et al. (2026). Transformasi Estetika dan Makna Ruang Publik: Studi Pantai Parkit Padang Pasca Banjir 2025. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2026. (pp. 64-78). Padang: Universitas Negeri Padang.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by author.

Pendahuluan

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun faktor manusia yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat (Sagita, 2016). Dalam konteks kebencanaan, bencana alam menjadi salah satu ancaman yang sering terjadi di Indonesia mengingat kondisi geografis dan klimatologis negara yang berada pada wilayah rawan berbagai jenis bencana. Bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga membawa perubahan sosial, budaya, dan makna terhadap ruang yang digunakan masyarakat. Dalam kehidupan perkotaan, ruang publik memiliki peran penting sebagai tempat interaksi sosial, rekreasi, aktivitas ekonomi, hingga pembentukan identitas masyarakat. Ketika suatu bencana terjadi, ruang publik mengalami perubahan baik dari segi fungsi, kondisi lingkungan, maupun nilai simbolik yang melekat di dalamnya. Perubahan tersebut kemudian memunculkan proses transformasi yang memengaruhi cara masyarakat memandang dan memanfaatkan ruang publik setelah terjadinya bencana.

Menurut Arif (2019), bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Berbagai jenis bencana tersebut memiliki karakteristik serta dampak yang berbeda-beda, namun seluruhnya berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bencana menjadi hal yang penting sebagai dasar dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana. Budiman & Akbar, (2023) menjelaskan bahwa bencana alam merupakan peristiwa atau kejadian alam yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan kerusakan serius terhadap lingkungan, harta benda, dan kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan fisik dan infrastruktur, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial serta menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Oleh sebab itu, diperlukan manajemen kebencanaan yang mencakup upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana guna meminimalkan risiko yang ditimbulkan.

Salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Banjir merupakan kondisi ketika air meluap dan menggenangi wilayah daratan yang biasanya tidak tergenang air. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti curah hujan yang tinggi, meluapnya sungai, buruknya sistem drainase, kerusakan daerah aliran sungai, hingga aktivitas manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan (Arif, 2019; Budiman & Akbar, 2023). Bencana banjir sering kali menimbulkan kerugian yang besar, baik berupa kerusakan permukiman, fasilitas umum, lahan pertanian, maupun terganggunya aktivitas masyarakat. Selain menimbulkan kerusakan fisik, bencana banjir juga berdampak terhadap aspek sosial dan kesehatan masyarakat. Menurut Atmaja, Arianto, & Darmawan, (2024) bencana banjir dapat menyebabkan kerusakan bangunan, kesulitan memperoleh air bersih, munculnya berbagai penyakit, hilangnya harta benda, serta terhambatnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bencana bukan hanya persoalan lingkungan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Pantai sebagai ruang publik memiliki nilai sosial dan estetika yang signifikan bagi masyarakat pesisir. Selain berfungsi sebagai tempat wisata, kawasan pantai juga berperan sebagai area berkumpul, sarana hiburan, dan dukungan aktivitas ekonomi bagi masyarakat setempat. Akan tetapi, kejadian banjir yang melanda pada tahun 2025 telah mempengaruhi secara signifikan kondisi lingkungan pesisir, infrastruktur, dan kegiatan sosial masyarakat di sekitarnya. Dampak tersebut tidak hanya muncul dalam perubahan fisik area, tetapi juga dalam perubahan pandangan masyarakat terhadap arti ruang publik yang sebelumnya dianggap aman, nyaman, dan menarik. Dalam konteks pembangunan kota, transformasi ruang publik setelah bencana menjadi masalah yang penting untuk diteliti karena berkaitan dengan proses pemulihan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Transformasi estetika ruang publik dapat diamati dari kondisi tata ruang, kebersihan lingkungan, sarana umum, hingga suasana visual area setelah bencana terjadi. Sementara itu, makna ruang publik bisa terlihat dari pengalaman, ingatan kolektif, serta cara masyarakat beradaptasi dalam memanfaatkan ruang itu kembali. Dengan demikian, studi tentang transformasi estetika

dan arti ruang publik menjadi penting untuk menggali bagaimana masyarakat merestorasi hubungan sosial dan emosionalnya dengan ruang yang terkena dampak bencana.

Pantai Parkit merupakan salah satu kawasan ruang publik yang mengalami dampak pasca banjir tahun 2025. Sebagai kawasan yang memiliki fungsi rekreasi dan sosial bagi masyarakat, perubahan yang terjadi di kawasan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam melihat bagaimana estetika kawasan berubah serta bagaimana masyarakat memaknai kembali ruang publik tersebut setelah bencana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dinamika transformasi ruang publik pascabencana serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan pengembangan ruang publik yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kawasan pesisir dan badan air perkotaan merupakan ruang terbuka publik yang dinamis dan memiliki peran multiaspek yang sangat signifikan dalam memengaruhi tatanan lingkungan, roda ekonomi, serta kehidupan sosial-budaya masyarakat (Nabilah & Sari, 2024; Ayuningtyas, 2025). Sebagai area yang dapat diakses secara inklusif, ruang terbuka publik bukan sekadar elemen ekologis, melainkan cerminan dari identitas lokal dan wadah interaksi kolektif yang menghidupkan karakter suatu kawasan (Ayuningtyas, 2025; Nurwarsih, Prasandya, 2022). Keunikan bentang alam pesisir secara alamiah membentuk daya tarik visual yang tinggi dan memberikan kepuasan psikologis bagi para pengunjung yang mencari katarsis dari tekanan rutinitas urban (Nabilah & Sari, 2024; Ayuningtyas, 2025). Pengembangan pariwisata pada ruang publik pantai terbukti mampu melahirkan potensi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta memperbaiki kualitas visual dan kebersihan lingkungan jika dikelola secara integratif (Ugrasena, Siwalatri, Prajnawrdhi, 2020). Namun, karena intensitas pemanfaatannya yang tinggi untuk kepentingan komersial, spiritual, dan sosial, ruang bersama ini sering kali memicu kontestasi pemanfaatan yang tidak terorganisir dan rentan mengalami kerusakan visual jika penataan fasilitas penunjang pariwisatanya mengabaikan kesesuaian estetika serta aksesibilitas (Nabilah, & Sari, 2024; Nurwarsih & Prasandya, 2022; (Prihandono, Suyoga, Pranajaya, Arnadwika, 2026).

Di sisi lain, ruang publik di wilayah pesisir menempati posisi yang sangat rentan secara geografis terhadap ancaman bencana alam hidrometeorologi, sedimentasi ekstrem, abrasi, hingga gelombang pasang (Gunawan, 2023). Ketika bencana melanda, dampaknya tidak hanya merusak infrastruktur fisik secara struktural, tetapi juga mendekonstruksi kualitas visual, memicu transformasi fungsi spasial, serta mengubah makna tempat (*place attachment*) yang telah terbangun secara organik di tengah masyarakat (Oktaviana, 2026); (Praganingrum, 2025; Dafrina, A.; Susilo, 2012). Fenomena nyata mengenai disrupsi spasial yang ekstrem ini terjadi pada Pantai Parkit di Kota Padang, Sumatra Barat. Sebagai bagian dari garis pantai Padang yang strategis, Pantai Parkit telah lama berfungsi sebagai ruang publik inklusif yang menampung aktivitas rekreasi, perdagangan informal, dan ekspresi budaya lokal. Namun, peristiwa bencana alam berupa *galodo* (banjir bandang bermaterialkan lumpur, batu, dan kayu) berskala besar yang melanda Kota Padang pada tahun 2025 telah mendatangkan transformasi morfologis yang masif dan anomali terhadap kawasan pesisir ini. Kebencanaan di wilayah Sumatra Barat secara historis memang erat kaitannya dengan kerentanan hidrometeorologi, di mana masyarakat lokal biasanya meresponsnya melalui sistem pengetahuan tradisional (*local knowledge*) dan mitigasi kultural (Rahmadani, Arifin, & Rahman, 2024). Namun, dampak lanskap dari *galodo* 2025 di Pantai Parkit melampaui prediksi mitigasi struktural biasa; banjir bandang tersebut mendeposisi sedimen material dalam volume raksasa langsung ke area perairan pantai. Dampak morfologis yang paling radikal dari peristiwa ini adalah mundurnya garis pantai secara drastis, di mana bagian tepian laut kini menjarak jauh lebih menjorok ke tengah. Lebih jauh lagi, akumulasi sedimentasi ekstrem tersebut memicu fenomena geofisik yang sangat unik, yaitu terbentuknya sebuah pulau baru secara alami tepat di tengah-tengah kawasan perairan Pantai Parkit. Perubahan bentang alam yang tidak terduga ini menciptakan struktur ruang baru yang mendefinisikan ulang batas-batas spasial dan estetika visual Pantai Parkit, memicu kedatangan gelombang pengunjung baru, sekaligus memunculkan tantangan baru terkait keselamatan dan tata kelola pariwisata pascabencana.

Kehadiran pulau baru dan mundurnya tepian laut pasca-*galodo* 2025 secara paradoks justru melahirkan daya tarik estetika visual baru dan memicu perubahan perilaku konsumsi ruang yang masif. Keberadaan pulau baru di tengah perairan dangkal ini merestrukturisasi preferensi masyarakat, di mana Pantai Parkit kini menjadi sangat ramai dikunjungi oleh berbagai lapisan pengunjung, khususnya warga lokal serta kelompok mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Padang. Fenomena bentang alam baru ini dimanfaatkan secara intensif oleh para pengunjung untuk melakukan aktivitas rekreasi yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu berjalan kaki menyeberangi permukaan laut yang mendangkal menuju pulau tersebut, berkumpul, dan menjadikannya sebagai latar belakang (*spot*) berfoto di tengah laut. Transformasi fungsi dari kawasan terdampak bencana alam menjadi ruang rekreasi aktif yang viral memperlihatkan adanya resiliensi perilaku masyarakat yang adaptif terhadap perubahan lingkungan, mirip dengan fenomena penataan ulang ruang publik kumuh menjadi area estetis yang memicu perubahan perilaku penggunaanya (Praganingrum, 2025). Namun, fenomena ini juga mendatangkan permasalahan pelik seperti ketidaknyamanan fasilitas,

potensi konflik pemanfaatan ruang komersial yang tidak teratur, risiko keselamatan pengunjung di area bentang alam baru, hingga degradasi keindahan akibat sampah rekreasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah evaluasi komprehensif yang mengintegrasikan penilaian estetika visual objektif dengan pembacaan dinamika spasial-sosial guna merumuskan rekomendasi pemulihan ruang publik pesisir Pantai Parkit yang tangguh, estetis, aman, dan kontekstual.

Untuk memosisikan penelitian ini dalam peta akademis yang objektif, analisis terhadap *state of the art* dilakukan dengan menelaah fokus dan batasan dari sepuluh penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian oleh Nabilah & Sari, (2024) menggunakan metode kuantitatif *Scenic Beauty Estimation* (SBE) untuk mengukur preferensi estetika lanskap pengunjung di Pantai Pasir Putih, Lampung, demi merumuskan rekomendasi desain pantai yang terbenakalai. Kajian Ayuningtyas (2025) menyoroti pemanfaatan ruang terbuka publik pantai secara kualitatif di Pantai Nyanyi, Tabanan, yang membentuk zona aktivitas ekonomi lokal di atas lahan privat. Nurwarsih & Prasandya (2022) menelaah karakteristik kualitas sosial-spasial di Pantai Kuta, Bali, guna mengidentifikasi praktik konsumsi ruang dan makna tempat yang terpengaruh era digital. Evaluasi pasca-konstruksi dipaparkan oleh Oktaviana, (2026) melalui metode Evaluasi Pasca Huni (EPH) investigatif untuk menilai keberhasilan fungsional dan perilaku pengguna pasca evitalisasi skala besar di Pantai Pangandaran. Sementara itu, Rahmadani, Arifin & Rahman, (2024) membedah perspektif antropologis terkait pengetahuan lokal (*local knowledge*) komunitas pesisir Sumatra Barat dalam menghadapi bencana banjir dan gempa. Hubungan antara masyarakat dan ketahanan fisik dibahas oleh Gunawan (2023) yang menganalisis peran komunitas pesisir dalam membangun resiliensi pascabencana alam seperti abrasi dan sedimentasi. Pada konteks transformasi fisik pascabencana, Dafrina, & Susilo, (2012) mengeksplorasi perubahan permukiman akibat faktor sosial-ekonomi pasca-tsunami di Aceh. Ugrasena, Siwalatri, & Prajnawrdhi, (2020) memperlihatkan bagaimana pemanfaatan ruang pesisir di Pantai Berawa Bali dapat meningkatkan nilai visual dan ekonomi pariwisata. Di sisi lain, Prihandono, Suyoga, Pranajaya, Arnadwika (2026) menekankan pentingnya evaluasi kesesuaian desain estetika dan aksesibilitas fasilitas publik untuk mendukung kenyamanan wisata. Terakhir, Praganingrum (2025) menganalisis transformasi fungsi dan pola ruang kawasan tepian air perkotaan dari area terdegradasi menjadi ruang publik yang estetis dan fungsional.

Perbedaan mendasar sekaligus nilai kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada penekanan fokus yang sangat spesifik serta sintesis interdisipliner terhadap pemulihan morfologi pascabencana ekstrem yang belum pernah dikaji dalam literatur ruang terbuka publik pesisir sebelumnya. Jika penelitian-penelitian terdahulu mengkaji estetika pantai dalam kondisi normal (Nabilah & Sari, 2024), transformasi ruang pariwisata murni (Ayuningtyas, 2025; Nurwarsih & Prasandya, 2022); Ugrasena, Siwalatri, Prajnawrdhi, 2020), evaluasi toilet pariwisata (Prihandono, Suyoga, Pranajaya & Arnadwika, 2026), dampak proyek revitalisasi buatan manusia (Oktaviana, 2026; Praganingrum, 2025), ataupun mitigasi dan rekonstruksi pascabencana tanpa elemen lanskap alami yang baru (Rahmadani, Arifin, Rahman, 2024; Gunawan, 2023) (Dafrina, A.; Susilo, 2012), maka penelitian ini secara khusus menyoroti transformasi estetika dan makna ruang publik yang dipicu secara radikal oleh bencana *galodo* 2025. Orisinalitas kajian ini bersumber dari analisis mendalam terhadap fenomena terbentuknya pulau baru di tengah laut dan mundurnya garis pantai di Pantai Parkit, serta bagaimana perubahan geomorfologis ekstrem tersebut didekonstruksi oleh warga lokal dan mahasiswa menjadi atraksi visual baru untuk berjalan dan berfoto di tengah laut. Penelitian ini mengisi kekosongan ilmiah dengan menganalisis bagaimana sebuah ruang publik pesisir merestrukturisasi nilai estetika formal-simboliknyanya dan menegosiasikan kembali makna ruangnya ketika dihadapkan pada trauma sekaligus berkah spasial pascabencana alam nyata tahun 2025, sehingga estetika visual tidak lagi dipandang sebagai ornamen statis melainkan sebagai indikator ketahanan (*resilience*) psikososial komunitas pesisir urban yang adaptif.

Berdasarkan perumusan masalah dan celah penelitian di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang jelas dan terarah. Pertama, untuk mengevaluasi secara kuantitatif preferensi estetika visual pengunjung khususnya warga lokal dan mahasiswa terhadap lanskap baru Pantai Parkit Padang pasca-*galodo* 2025 menggunakan metode *Scenic Beauty Estimation* (SBE). Kedua, untuk menganalisis pola transformasi spasial dan fungsional, perluasan zona aktivitas ke area tengah laut, serta kualitas aksesibilitas pulau baru tersebut sebagai ruang bersama melalui pendekatan Evaluasi Pasca Huni (EPH). Ketiga, untuk mengidentifikasi kontribusi pengetahuan lokal dan strategi adaptasi keselamatan pengunjung dalam membentuk kembali makna tempat (*place attachment*) yang berbasis kesadaran mitigasi bencana. Akhirnya, tujuan pamungkas dari kajian ini adalah merumuskan arahan pengembangan desain dan tata kelola lanskap ruang publik Pantai Parkit yang mengintegrasikan nilai estetika fenomena alam baru, keamanan wisatawan, keberlanjutan ekonomi-komunitas, dan ketahanan terhadap risiko bencana di masa depan.

Melalui pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang luas. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan arsitektur lanskap, sosiologi spasial, dan manajemen bencana melalui pengembangan model evaluasi ruang publik pesisir yang interdisipliner menghadapi anomali pascabencana. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual

mengenai bagaimana teori preferensi visual berinteraksi dengan teori perilaku spasial manusia dalam kondisi pemanfaatan bentang alam baru hasil sedimentasi bencana di wilayah pesisir urban. Secara praktis, bagi Pemerintah Kota Padang dan pembuat kebijakan, penelitian ini menyediakan data empiris berbasis persepsi masyarakat dan mahasiswa yang dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pesisir yang aman, serta regulasi pengelolaan pulau baru di Pantai Parkit agar ramah wisatawan namun tetap mengutamakan aspek keselamatan mitigasi. Bagi masyarakat lokal dan pelaku usaha informal, hasil penelitian ini dapat menjadi jembatan advokasi untuk memastikan penataan ruang rekreasi baru di masa depan bersifat inklusif dan mempertahankan ruang produktif ekonomi mereka. Bagi praktisi desain seperti arsitek dan perencana lanskap, penelitian ini menyediakan panduan desain praktis mengenai integrasi sirkulasi penyeberangan yang aman, penataan koridor visual pantai linear yang efektif, kesesuaian estetika fasilitas umum, serta pemanfaatan pulau baru sebagai elemen lanskap edukasi bencana alam yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki arti penting yang mendesak (*urgency*) mengingat Kota Padang merupakan wilayah pesisir yang secara historis dan geografis sangat rawan terhadap bencana hidro-meteorologi dan *galodo*. Mengabaikan evaluasi ruang publik pascabencana yang mengalami perubahan morfologi ekstrem seperti Pantai Parkit hanya akan melanggengkan penataan ruang yang serabutan, membahayakan keselamatan para pengunjung yang berjalan ke tengah laut tanpa pengawasan, serta memicu kerugian ekonomi dan hilangnya identitas kawasan pariwisata pantai. Dengan mengeksplorasi hubungan dialektis antara keindahan visual pulau baru, fungsi spasial pantai yang meluas, dan memori kolektif lokal pasca-*galodo* 2025, penelitian ini memegang peran kunci dalam mengawal transformasi Pantai Parkit. Pemulihan ruang publik yang berhasil pascabencana bukan sekadar mengembalikan atau mempertahankan fasilitas fisik seperti sedia kala, melainkan mengadaptasi perubahan lanskap alami yang baru secara bijaksana, estetis, aman, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia serta lingkungannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus, dengan tujuan untuk memahami perubahan estetika dan makna sosial dari ruang publik Pantai Parkit setelah terjadi banjir pada tahun 2025. Pendekatan kualitatif dipilih karena cocok untuk memahami fenomena perubahan sosial yang rumit dan berlangsung di dalam konteks tertentu. Seperti yang dijelaskan dalam buku *Mengelola Perubahan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas* (Hardjodijono, 2025), perubahan sosial tidak hanya melibatkan perubahan materi, tetapi juga perubahan makna, nilai, serta cara berinteraksi dalam masyarakat. Penelitian tersebut dilakukan di Pantai Parkit, Kota Padang pada tahun 2026. Informan dipilih dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria berikut: (1) pernah berkunjung atau beraktivitas di Pantai Parkit, baik sebelum maupun setelah terjadi banjir, (2) mampu membandingkan kondisi wilayah sebelum dan sesudah bencana, serta (3) bersedia ditemui dan diwawancarai secara sukarela. Dalam penelitian ini, terdapat enam orang informan yang terdiri dari empat orang pengunjung, satu orang yang berprofesi sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah, dan satu orang warga setempat. Nama informan disamarkan untuk menjaga kerahasiaan. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu wawancara mendalam, pengamatan di lapangan, dan pengumpulan dokumen. Wawancara yang dilakukan dengan metode semi terstruktur menggunakan panduan pertanyaan yang mencakup beberapa hal, yaitu: (a) penilaian mengenai keindahan pantai sebelum dan setelah terjadi banjir, (b) perubahan fisik yang paling terlihat, (c) perubahan makna dari ruang publik, (d) dampak terhadap interaksi sosial masyarakat, (e) bentuk adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat, serta (f) peran pemerintah dalam menghadapi situasi tersebut. Setiap wawancara berlangsung sekitar 20 hingga 30 menit dan direkam dengan mendapat izin dari informan. Observasi di lapangan dilakukan tiga kali dalam waktu yang berbeda, yaitu pagi, sore, dan malam, agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap. Aspek yang diamati mencakup kondisi fisik pantai seperti kayu yang terdampar, sampah plastik, perubahan garis pantai, dan adanya pulau baru. Selain itu, juga dilihat aktivitas pengunjung, termasuk jenis kegiatan yang dilakukan, sebaran lokasi mereka, serta tingkat kepadatannya. Interaksi sosial yang terjadi juga menjadi perhatian. Dokumentasi dilakukan dengan mengambil foto kondisi lapangan, foto bersama dengan informan, serta membuat catatan lapangan untuk memperkuat data yang diperoleh. Uji kebenaran data dilakukan dengan membandingkan informasi dari pengunjung, UMKM, dan masyarakat lokal, serta membandingkan hasil wawancara dengan observasi langsung. Proses ini juga didukung dengan pengamatan yang dilakukan lebih lama di lapangan dan pemeriksaan ulang oleh pihak terkait untuk memastikan tidak ada salah tafsir atau kesalahan dalam pengambilan data. Data dianalisis menggunakan model (Miles, Huberman & Saldaña, 2014) yang terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pada tahap reduksi data, data disortir dan difokuskan ke dalam beberapa tema utama seperti perubahan estetika, perubahan makna sosial, interaksi sosial, adaptasi masyarakat, serta peran pemerintah. Tahap penyajian

data dilakukan dengan berbagai bentuk seperti narasi deskriptif, tabel tematik, dan kutipan langsung dari responden. Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan, hasil analisis ditinjau secara bertahap hingga diperoleh kesimpulan akhir yang menjawab tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Transformasi Kondisi Fisik dan Estetika Pantai Parkit Pasca Banjir

Hasil penelitian menunjukkan Pantai Parkit Padang mengalami perubahan fisik yang cukup signifikan pasca banjir *galodo* November 2025. Perubahan tersebut tampak pada kondisi lingkungan pesisir, perubahan bentuk daratan, serta perubahan estetika kawasan pantai secara keseluruhan. Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan pada 9 Mei 2026, ditemukan tumpukan kayu besar yang masih tersebar di sepanjang pesisir pantai, sampah plastik di berbagai titik, perubahan garis pantai akibat sedimentasi masif, hingga terbentuknya daratan atau pulau kecil baru di sekitar kawasan pantai. Perubahan-perubahan ini tidak terjadi secara parsial, melainkan saling berkaitan dan membentuk lanskap pesisir yang secara visual sangat berbeda dibandingkan kondisi sebelum bencana. P selaku pelaku UMKM yang sehari-hari beraktivitas di kawasan Pantai Parkit menjelaskan terbentuknya pulau baru merupakan dampak langsung dari perubahan sedimentasi pasca banjir. Ia menyatakan:

"...Menurut saya jauh sangat berbeda sangat signifikan dari kebersihan pantai ini sendiri, seperti banyak sampah, kayu kayu terdampar, tapi ada keuntungan bagi warga sekitar, kayu kayu yang terdampar itu bisa dimanfaatkan warga sekitar. Pulau baru yang baru terbentuk ini sih, karena perubahan sendimen dari pasir atas sampai bawah lahir lah pulau baru, tepian nya jadi dangkal. Dulu sebelum banjir banyak mahasiswa yang nongkrong disini bahkan remaja laki-laki banyak yang surfing memanfaatkan ombak, tapi setelah terjadi banjir mereka sudah gabisa surfing lagi karena sudah menjorok ke tengah dan tidak dapat ombak yang bagus lagi..." (Wawancara dengan pada 9 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menggambarkan dua hal yang terjadi secara bersamaan: kerusakan estetika akibat kotoran dan material banjir, serta munculnya elemen baru yang tidak direncanakan. Proses sedimentasi yang berlangsung dalam skala besar dalam waktu singkat menciptakan morfologi pesisir yang sepenuhnya baru dan tidak terduga, bahkan bagi masyarakat yang sudah lama beraktivitas di sekitar kawasan tersebut. Hilangnya aktivitas *surfing* juga menjadi penanda bahwa perubahan yang terjadi bukan sekadar persoalan estetika permukaan, tetapi menyentuh perubahan karakter hidrologis kawasan secara fundamental.

Selain perubahan bentuk daratan, kondisi kebersihan pantai juga mengalami penurunan yang cukup mencolok. MA selaku pengunjung mengungkapkan kondisi pantai setelah banjir menjadi jauh lebih kotor dibandingkan sebelumnya, dan yang menjadi persoalan serius adalah minimnya perhatian terhadap sampah plastik. Ia menyatakan:

"...Kalau dibandingkan dari sebelumnya, sebelumnya itu nggak sekotor ini dan tidak ada kayu-kayu, cuman ada sedikit sampah-sampah plastik di sekitar sini. Terus sehabis *galodo* makin tambah banyak sampah plastiknya, jadi orang-orang disini cuman memikirkan kayu aja buat di hancurkan, yang plastik-plastik ini diabaikan, padahal sampah plastik ini lebih lama dari sampah kayu, jadi orang-orang disini lebih fokusnya di kayu aja nggak di plastiknya. Kalau semisalnya nggak ada kayu-kayu ini orang-orang bisa ramai duduk-duduk di sekitar pantai ini, jadi semenjak ada kayu-kayu ini orang akan pindah ke tempat yang lebih luas lagi, tempat yang nyaman..." (Wawancara pada 9 Mei 2026).

Pernyataan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penanganan pasca bencana di tingkat masyarakat. Kayu yang bersifat material produktif dan dapat dimanfaatkan secara langsung mendapat perhatian lebih besar, sementara sampah plastik yang justru memiliki daya rusak jangka panjang terhadap ekosistem pesisir cenderung diabaikan. Hal ini mencerminkan pola respons masyarakat yang bersifat pragmatis dan berorientasi pada manfaat ekonomi jangka pendek, bukan pada pemulihan ekologis yang menyeluruh.

Perubahan kondisi fisik tersebut memunculkan beragam persepsi terkait estetika pantai. Sebagian pengunjung menganggap perubahan tersebut merusak keindahan pantai, tetapi sebagian lainnya justru melihat adanya daya tarik baru akibat terbentuknya pulau kecil baru. Pandangan yang bersifat ambivalen ini disampaikan oleh kelompok pengunjung muda, yaitu NV, ND, dan E:

"...Menurut saya setelah *galodo* ini ada penambahan peningkatan tanah seperti yang kita lihat di depan bagus bagus aja, karena jadinya terbentuk sebuah pulau, tapi mungkin kayu kayu yang terdampar jadi minusnya lagi dan sangat mengganggu, jadi ada plus minusnya sih. Di sisi lain

walaupun banyak minusnya tapi yang kita lihat di depan juga indah, ada sesuatu yang baru gitu, ga terlalu mengubah pandangan saya sih. Kayu kayu yang terdampar ini sangat mencolok tapi bisa dimanfaatkan kayak jadi tempat-tempat duduk di tepian pantai, selain itu sampah-sampah juga masih banyak..." (Wawancara pada 9 Mei 2026).

Pandangan yang bersifat *plus-minus* ini mengindikasikan masyarakat pengguna ruang publik tidak semata-mata menilai estetika dari perspektif kerapian atau kebersihan saja, melainkan juga dari keunikan pengalaman visual yang ditawarkan. Fenomena terbentuknya pulau baru menciptakan apa yang bisa disebut sebagai "estetika kebaruan" sebuah daya tarik yang lahir bukan dari perencanaan, melainkan dari peristiwa alam yang tidak terduga. Kondisi ini relevan dengan konsep *place attachment* yang menyatakan bahwa keterikatan manusia terhadap suatu ruang tidak hanya dibangun oleh keindahan statis, tetapi juga oleh pengalaman dan kenangan yang tercipta di dalamnya.



Gambar 1. Pemandangan Pantai Parkit Setelah Galodo 2025, Tumpukan Kayu Besar di Tepi Pantai, Penampakan Pulau Baru Hasil Endapan Tanah

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan dokumentasi gambar di atas, tampak jelas bagaimana bencana banjir bandang di tahun 2025 telah secara total mengubah tampilan Pantai Parkit. Di satu sisi, area pantai dipenuhi dengan tumpukan kayu besar dan sampah yang berserakan, menunjukkan alasan mengapa beberapa pengunjung beranggapan keindahan pantai ini telah hilang. Namun, di sisi lain, endapan tanah yang ditimbulkan oleh bencana tersebut malah menciptakan sebuah pulau kecil yang unik di tengah laut. Kontras visual antara tumpukan kayu yang berserakan di tepi pantai dan kehadiran pulau baru yang menawan inilah yang menyebabkan munculnya pandangan pro dan kontra di kalangan pengunjung. Foto tersebut membuktikan bahwa bencana alam tidak hanya meninggalkan kerusakan, tetapi juga bisa menghasilkan daya tarik visual dan ruang untuk petualangan baru yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun.

Dampak terhadap Penggunaan Ruang Publik dan Aktivitas Masyarakat

Perubahan kondisi fisik pantai turut memengaruhi pola penggunaan ruang publik oleh masyarakat secara menyeluruh. Sebelum banjir, kawasan Pantai Parkit dimanfaatkan secara leluasa sebagai tempat berkumpul dan bersantai oleh masyarakat maupun mahasiswa, terutama pada sore hingga malam hari. Namun, pasca banjir masyarakat menjadi lebih selektif dalam memilih area untuk beraktivitas karena sebaran kayu dan sampah yang tidak merata membatasi zona yang layak digunakan. Perubahan ini bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis pengguna ruang, di mana rasa nyaman dan bebas yang sebelumnya dimiliki pengunjung kini harus dikompromikan dengan kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya pulih.

MA menjelaskan secara rinci bagaimana perubahan tersebut mengubah cara dirinya dan pengunjung lain menggunakan ruang pantai:

"...Sebelum galodo datang kan kita bisa duduk di sekitar pasir ini karena nggak terlalu banyak kayu dan plastiknya. Jadi setelah galodo tersebut lebih memilih lagi nih dimana tempat duduk dan tempat bersantai lagi, biasanya disini ramai dari sore sampai malam sekitar jam 10 tapi itu biasanya di cafe-cafe saja. Kalau menurut saya berpengaruh karena kalau semisalnya nggak ada kayu-kayu ini orang-orang bisa ramai duduk-duduk di sekitar pantai ini, jadi semenjak ada kayu-kayu ini orang akan pindah ke tempat yang lebih luas lagi, tempat yang nyaman. Kalau kayu ini yang bersihin setau saya cuman warga-warga sini yang ngambil kayu ini untuk kebutuhan mereka..." (Wawancara pada 9 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menggambarkan terjadinya pergeseran spasial dalam penggunaan ruang publik. Pengunjung yang semula bebas menyebar di sepanjang pesisir kini terkonsentrasi di area-area tertentu yang lebih bersih, umumnya di sekitar cafe atau warung yang memiliki penataan lebih rapi. Ini mencerminkan

proses "seleksi spasial" yang terjadi secara organik, di mana pengguna ruang secara mandiri menetapkan ulang batas-batas zona kenyamanan mereka dalam merespons perubahan kondisi lingkungan.



Gambar 2. Suasana Pengunjung yang Ramai Datang dan Menikmati Lanskap Baru di Pantai Parkit

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan dokumentasi gambar di atas, terlihat jelas bagaimana masyarakat langsung merespons perubahan fisik Pantai Parkit dengan aktivitas yang sangat dinamis. Meskipun kondisi pantai belum bersih total dari sisa material banjir, foto tersebut menunjukkan bahwa minat pengunjung untuk datang justru meningkat karena rasa penasaran yang tinggi. Kehadiran pengunjung yang ramai berkumpul, bersantai, dan berjalan di sekitar pesisir membuktikan bahwa fungsi Pantai Parkit sebagai ruang publik tidak mati akibat bencana. Sebaliknya, gambar ini memperlihatkan adanya pergeseran aktivitas wisata, di mana area pantai yang berubah dan kemunculan pulau baru di tengah laut kini dimanfaatkan masyarakat sebagai spot rekreasi alternatif dan petualangan spontan yang menghidupkan kembali suasana kawasan tersebut.

S selaku masyarakat lokal juga mengamati perubahan pola kunjungan dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi warga sekitar:

"...Kalau dari segi pengunjung tetap banyak yang datang, tetapi dari segi UMKM warga tidak naik. Tidak ada perubahan karena kondisi ekonomi tetap seperti biasa, karena tidak adanya pungutan biaya untuk masuk ke pantai ini, pengunjung kerap datang hanya untuk duduk-duduk saja. Cukup merusak lingkungan karena banyak material kayu dan pengunjung membuang sampah sembarangan, membuat pantai menjadi tidak bersih. Iya karena adanya terbentuk pulau baru tadi yang menarik perhatian pengunjung untuk datang dari berbagai daerah..." (Wawancara pada 9 Mei 2026).

Pengamatan S mengungkap ironi yang penting: meskipun jumlah pengunjung meningkat akibat daya tarik pulau baru, peningkatan tersebut tidak serta-merta berujung pada perbaikan kondisi ekonomi masyarakat lokal. Ketidadaan mekanisme retribusi atau pungutan masuk berarti aliran pengunjung yang lebih banyak tidak menghasilkan pendapatan tambahan secara langsung bagi warga sekitar. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu fenomena dalam menarik kunjungan belum tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan komunitas yang mendiami kawasan tersebut, dan diperlukan mekanisme yang lebih terstruktur agar manfaat ekonomi dari transformasi ruang publik dapat dinikmati secara lebih merata. Kondisi yang ini menunjukkan bahwa ruang publik yang baru muncul setelah bencana tetap hanya berfungsi sebagai daya tarik visual bagi para pengunjung, tanpa memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan modal bagi pelaku usaha kecil di sekitarnya. Alhasil, keramaian yang ada di sekitar Pantai Parkit belum berhasil berfungsi sebagai dorongan ekonomi yang berkelanjutan untuk keberlangsungan hidup masyarakat lokal

Dampak Ekonomi dan Adaptasi UMKM

Banjir November 2025 juga memberikan dampak yang kompleks terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di kawasan Pantai Parkit. Dampak yang dirasakan tidak bersifat seragam dan mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Pada fase awal pasca bencana, ketika kondisi kawasan pantai paling parah dan belum ada pembenahan, jumlah pengunjung dan aktivitas ekonomi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun kondisi tersebut perlahan berubah seiring meningkatnya rasa penasaran masyarakat terhadap fenomena pulau baru.

P menguraikan dinamika tersebut dengan gamblang:

"...Standar standar aja sih karena tetap melihat pasar atau market kita kayak awal bulan, ga tau mereka mau jajan apa tidaknya. Tapi setelah terjadi banjir ini dan terbentuk pulau ini jadi lumayan rame karena sebelumnya cuma mahasiswa UNP aja yang main kesini tapi sekarang sudah beragam dan banyak. Paling yang pas kejadian sih para UMKM jadi gabisa ngapa-ngapain. Kalau untuk pemerintah setahu saya tidak ada ya, nama-nama besar di pemerintahan

juga tidak ada saya dengar, tapi entah di luar itu ada tetapi saya sendiri yang tidak tahu, yang terjun langsung pastinya RT, ketua pemuda, petugas sekitar, dan masyarakat..." (Wawancara pada 9 Mei 2026).

Pernyataan tersebut mengungkap pola yang menarik: pada saat kejadian bencana, aktivitas ekonomi lumpuh total karena kawasan tidak bisa diakses dan tidak ada pengunjung. Namun dalam jangka menengah, keberadaan pulau baru sebagai fenomena alam yang viral justru menjadi stimulus ekonomi tidak langsung yang memperluas pangsa pasar pelaku UMKM. Pernyataan Purba juga secara implisit mengungkap minimnya keterlibatan pemerintah dalam proses pemulihan, yang berarti adaptasi ekonomi yang dilakukan pelaku usaha berjalan sepenuhnya atas inisiatif mandiri tanpa dukungan kebijakan yang berarti. Dalam menghadapi perubahan tersebut, pelaku UMKM menunjukkan resiliensi ekonomi dengan melakukan berbagai strategi adaptasi. P menjelaskan langkah konkret yang dilakukannya:

"...Promosi lebih tinggi lagi sih, biasanya orang yang udah tau kami jualan mungkin setelahnya lebih luas lagi jangkauannya seperti orang baru, lebih memperkenalkan menu makanan dan minumannya. Palingan rute menuju kesini, yang biasanya nyaman sekarang jadi banyak sampah-sampahnya, kita harus bersihin dulu. Saya berharap dari pengunjung, pemerintah, warga lokal sampah-sampah diperhatikan lagi, janganlah ada penebangan liar lagi, saling menjaga dan merawat bersamalah..." (Wawancara pada 9 Mei 2026).

Strategi promosi yang diperluas ini mencerminkan kemampuan adaptasi pelaku UMKM dalam membaca peluang yang muncul dari perubahan kondisi lingkungan. Selain memperluas jangkauan promosi, Purba juga harus menghadapi tantangan operasional tambahan berupa perlunya membersihkan akses jalan menuju kawasan usahanya sebelum dapat beroperasi dengan normal. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban adaptasi yang ditanggung pelaku UMKM pasca bencana bersifat berlapis: mereka tidak hanya harus berinovasi dalam strategi pemasaran, tetapi juga menanggung biaya tambahan dalam bentuk waktu dan tenaga untuk memastikan aksesibilitas dasar kawasan usaha mereka tetap terjaga.

Dinamika Sosial dan Solidaritas Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan dinamika sosial masyarakat pasca banjir yang bersifat dialektis di satu sisi memunculkan penguatan solidaritas, namun di sisi lain juga memperlihatkan munculnya potensi konflik kepentingan. Dalam situasi bencana, solidaritas masyarakat terlihat meningkat secara nyata melalui kegiatan gotong royong, pengumpulan donasi, dan upaya kolektif untuk membersihkan dampak bencana.

S selaku masyarakat lokal memaparkan kondisi tersebut:

"...Makin solid saya lihat karena pasca bencana ini kami satu sama lain saling menguatkan, saling mengumpulkan donasi untuk korban bencana, gotong royong membersihkan dampak bencana. Menurut saya bencana ini belum pernah terjadi, galodo ini disebabkan karena ulah manusia juga, karena itu Pantai Parkit ini menjadi berbeda dari tahun sebelumnya. Banyak dimulai dari membersihkan pantai tapi material seperti kayu tidak dapat sepenuhnya dibersihkan oleh masyarakat sekitar karena adanya larangan tersembunyi dari kelompok yang memiliki modal dan kuasa yang lebih besar..." (Wawancara pada 9 Mei 2026).

Pernyataan S mengandung dua hal yang signifikan. Pertama, ia mengonfirmasi bahwa bencana ini meningkatkan solidaritas sosial dalam jangka pendek. Kedua, ia secara tegas mengidentifikasi adanya hambatan struktural dalam upaya pemulihan bersama, berupa dominasi kelompok bermodal yang secara diam-diam mengontrol akses terhadap sumber daya material di kawasan pantai. Solidaritas yang muncul di permukaan ternyata tidak cukup kuat untuk meruntuhkan struktur kekuasaan informal yang sudah lama mengakar di kawasan tersebut.

Konflik kepentingan atas pemanfaatan kayu terdampar juga diamati oleh pengunjung. MA menggambarkan situasi tersebut:

"...Kalau ada misalnya kayu ini kan tidak ada yang punya sekarang ini, jadi kalau ada orang lain yang datang buat ambil satu kayu saja masyarakat disini seperti kurang menerima karena dianggap hak milik mereka karena kayunya terletak disini. Kalau yang bersihin setau saya cuman warga-warga sini yang ngambil kayu ini untuk kebutuhan mereka. Kalau semisalnya masih ada kayu-kayu ini masih ada mungkin daya tariknya kurang, tapi kalau dibersihkan mungkin akan meningkatkan daya tarik orang luar untuk kesini, tapi dengan adanya fenomena pantai parkit yang lebih menjorok ini jadi orang-orang tertarik untuk datang ke bagian pantai itu..." (Wawancara pada 9 Mei 2026).

Konflik atas kepemilikan material bencana ini mencerminkan kompleksitas relasi sosial dalam pemanfaatan ruang publik, terutama ketika terjadi kondisi luar biasa seperti bencana alam. Kayu-kayu terdampar yang secara hukum formal tidak memiliki pemilik yang jelas, dalam praktiknya diklaim secara informal oleh kelompok masyarakat tertentu berdasarkan prinsip kedekatan lokasi. Klaim informal semacam ini tidak hanya membatasi akses masyarakat lain, tetapi juga menghambat upaya penataan kawasan pantai secara menyeluruh. Pernyataan Muhammad Alfareza juga memperlihatkan kesadaran bahwa pembersihan kayu sesungguhnya akan berdampak positif bagi daya tarik wisata kawasan, namun kepentingan kelompok yang mengklaim material tersebut menjadi penghalang bagi terwujudnya perbaikan yang lebih luas.

Bentuk Adaptasi Masyarakat terhadap Kondisi Pantai

Masyarakat dan pengunjung Pantai Parkit menunjukkan beragam bentuk adaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan pasca banjir. Adaptasi ini tidak bersifat pasif, melainkan aktif dan kreatif dalam menemukan cara-cara baru untuk tetap memanfaatkan kawasan pantai meski kondisinya belum sepenuhnya pulih. Pola adaptasi yang teridentifikasi mencakup dimensi fisik, ekonomi, maupun simbolik dalam pemaknaan ruang.

MA menawarkan gagasan konkret yang menggambarkan bentuk adaptasi kreatif berbasis material local.

"...Kalau upayanya kayu-kayu ini bisa dimanfaatkan untuk buat palang, pembatas, tempat duduk, bukan sekedar ditumpuk saja yang mengganggu pemandangan, kalau niat untuk membersihkan seluruhnya belum ada. Kalau keterlibatan pemerintah awal-awal ada, cuman beberapa tempat aja yang dibersihkan seperti kayunya di tepikan dan diperkecil. Harapan saya yang pertama plastik-plastik sampah di sekitar sini dibersihkan, yang kedua untuk memperindahkannya ya dimanfaatkanlah kayu-kayu ini jadi tempat santai disini seperti buat tempat duduk begitu..." (Wawancara pada 9 Mei 2026).

Gagasan ini mencerminkan pendekatan adaptasi berbasis sumber daya lokal yang merupakan bentuk resiliensi komunitas yang khas di kawasan pesisir. Alih-alih memandang material terdampar semata sebagai masalah yang harus disingkirkan, masyarakat mengidentifikasi potensi nilai guna yang terkandung di dalamnya. Pernyataan ini juga secara tidak langsung menyiratkan bahwa keterlibatan pemerintah yang terbatas pada fase awal tidak memberikan dampak pemulihan yang berarti, sehingga inisiatif masyarakat menjadi tumpuan utama dalam upaya pembenahan kawasan.

Adaptasi juga terlihat pada cara pengunjung muda menyesuaikan perilaku penggunaan ruang mereka. NV, ND, dan E menggambarkan bagaimana mereka tetap menemukan nilai dan kesenangan di kawasan pantai yang berubah:

"...Ga terlalu mengubah pandangan saya sih, di sisi lain walaupun banyak minusnya tapi yang kita lihat di depan juga indah, ada sesuatu yang baru gitu. Sepertinya iya, contohnya sekarang makin sore makin ramai pengunjung yang datang, ada yang sekedar duduk-duduk, ada yang main futsal, main voli, main-main air di tepian laut. Harapannya semoga aspek pemerintah serta seluruh masyarakat bisa menangani masalah sampah yang sangat mengganggu ini, karena pantai parkit ini setelah terjadi galodo ada hal yang baru jadi harusnya lebih dijaga dan dirawat..." (Wawancara pada 9 Mei 2026).

Gambaran aktivitas yang dipaparkan oleh informan ini menunjukkan bahwa diversifikasi penggunaan ruang terjadi secara organik pasca bencana. Kawasan yang sebelumnya memiliki pola penggunaan lebih terbatas kini berkembang menjadi ruang multifungsi yang menampung berbagai aktivitas secara bersamaan. Adaptasi perilaku inilah yang sesungguhnya mempertahankan relevansi Pantai Parkit sebagai ruang publik utama di Kota Padang, bahkan dalam kondisi yang belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana. Harapan yang disampaikan bersamaan dengan deskripsi adaptasi juga menunjukkan bahwa pengunjung muda memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab kolektif dalam menjaga kawasan yang kini memiliki daya tarik baru tersebut.

Harapan Masyarakat terhadap Penataan Pantai

Penelitian menemukan masyarakat dari berbagai lapisan memiliki harapan besar dan konkret terhadap penataan kembali Pantai Parkit pasca banjir. Harapan-harapan ini tidak bersifat abstrak, melainkan mengacu pada aspek-aspek spesifik yang dirasakan sebagai masalah utama. Secara umum, harapan masyarakat mencakup tiga dimensi utama: pembenahan lingkungan fisik, perbaikan tata kelola kawasan, dan pemerataan akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

P menyuarakan harapannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kawasan pantai:

"...Saya berharap dari pengunjung, pemerintah, warga lokal sampah-sampah diperhatikan lagi, janganlah ada penebangan liar lagi, saling menjaga dan merawat bersamalah. Standar standar aja sih karena tetap melihat pasar atau market kita, tapi setelah terjadi banjir ini dan terbentuk pulau ini jadi lumayan rame karena sebelumnya cuma mahasiswa UNP aja yang main kesini tapi sekarang sudah beragam dan banyak. Kalau untuk pemerintah setahu saya tidak ada yang terjun langsung, yang ada pastinya RT, ketua pemuda, petugas sekitar, dan masyarakat..." (Wawancara pada 9 Mei 2026).

Harapan P merefleksikan kesadaran bahwa pemulihan kawasan tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Ia secara eksplisit menyebut tiga aktor utama — pengunjung, pemerintah, dan warga lokal — sebagai pihak yang harus sama-sama bertanggung jawab. Fakta bahwa pemerintah formal tidak hadir secara nyata dalam proses pemulihan, sementara yang aktif justru adalah struktur komunitas informal seperti RT dan ketua pemuda, menunjukkan bahwa modal sosial lokal menjadi tulang punggung resiliensi kawasan dalam ketiadaan dukungan institusional yang memadai.

Sementara itu, S menyuarakan dimensi keadilan ekonomi yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam wacana penataan ruang publik pesisir:

"...Harapan bapak masyarakat sekitar ini diizinkan untuk membuat usaha kecil-kecilan, tidak adanya larangan dari jagoan yang memiliki modal lebih besar. Banyak dimulai dari membersihkan pantai tapi material seperti kayu tidak dapat sepenuhnya dibersihkan oleh masyarakat sekitar karena adanya larangan tersembunyi dari kelompok yang memiliki modal dan kuasa yang lebih besar. Belum sepenuhnya pemerintah memulihkan kembali dan membuat pantai parkit menjadi lebih bagus, dan masyarakat sekitar pun mau untuk membersihkan tetapi adanya larangan dari orang yang punya kekuasaan dan modal, sehingga terhambatnya masyarakat untuk menata kembali Pantai Parkit ini..." (Wawancara pada 9 Mei 2026).

Harapan S ini mengungkap dimensi ketidakadilan struktural yang tersembunyi di balik wacana penataan ruang publik. Proses pemulihan pascabencana berisiko hanya menguntungkan pihak-pihak yang sudah memiliki modal besar apabila tidak ada kebijakan afirmatif yang secara eksplisit melindungi hak masyarakat lokal berpenghasilan rendah. Pernyataan Simon secara konsisten menyebutkan adanya "larangan tersembunyi" dan dominasi "jagoan bermodal" yang tidak hanya menghambat akses ekonomi, tetapi juga secara aktif menghalangi upaya gotong royong pemulihan lingkungan. Ini menegaskan bahwa transformasi ruang publik pasca bencana tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan keadilan sosial, dan perencanaan pemulihan yang baik harus mengintegrasikan suara masyarakat yang paling rentan, bukan hanya kepentingan kelompok yang memiliki akses dan kapital lebih besar.

Secara keseluruhan, harapan-harapan yang disampaikan oleh berbagai informan menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menginginkan pemulihan kondisi seperti sedia kala, tetapi juga menghendaki penataan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berkelanjutan dari kondisi sebelum bencana. Ini merupakan sinyal penting bahwa bencana, dalam perspektif masyarakat, juga dipandang sebagai momentum untuk melakukan perbaikan struktural yang selama ini tertunda.

Pembahasan

Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun faktor manusia. Dalam konteks penelitian yang dikaji, bencana banjir menjadi salah satu jenis bencana yang paling sering terjadi dan memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Menurut [Sagita \(2016\)](#), banjir merupakan bencana alam yang sangat berbahaya karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat, merusak infrastruktur, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan dan penduduk di wilayah terdampak. Sementara itu, [\(Arif, 2019\)](#) menjelaskan bahwa banjir terjadi akibat meluapnya air sungai yang dipengaruhi oleh curah hujan tinggi, kerusakan daerah aliran sungai, kesalahan tata ruang, pendangkalan sungai, serta aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan pembuangan sampah sembarangan. Dampak yang ditimbulkan meliputi kerusakan permukiman, lahan pertanian, munculnya penyakit, hingga bencana susulan seperti tanah longsor. Selanjutnya, [Budiman & Akbar, 2023\)](#) menyatakan bahwa bencana alam merupakan kejadian yang tidak terkendali dan dapat menyebabkan kerusakan serius terhadap lingkungan, harta benda, dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian bencana melalui mitigasi, sistem peringatan dini, manajemen risiko, serta koordinasi antarinstansi untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.

Banjir bandang (galodo) yang melanda Pantai Parkit pada November 2025 tidak dapat dipahami semata sebagai peristiwa alam yang bersifat episodik dan destruktif, melainkan harus dibaca sebagai sebuah momen kritis yang secara fundamental mengubah lintasan sejarah lokal kawasan pesisir tersebut. Dalam penelitian [\(Atmaja, Arianto & Darmawan, 2024\)](#), bencana banjir tidak hanya menimbulkan kerugian material berupa kerusakan bangunan dan infrastruktur, tetapi juga menyebabkan kesulitan air bersih,

gangguan kesehatan, serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Oktaviana (2026) menegaskan wilayah pesisir pantai secara alami memiliki berbagai dinamika lingkungan. Fenomena bencana banjir bandang dan tanah longsor dipahami sebagai representasi dari kondisi masyarakat risiko, di mana bencana terjadi sebagai konsekuensi langsung dari aktivitas eksploitatif manusia yang mengabaikan keseimbangan alam. Kegagalan modernitas dalam menjaga ekosistem ini menuntut adanya refleksi kritis terhadap pola pengelolaan sumber daya alam yang semula hanya berorientasi pada pemenuhan ekonomi jangka pendek (Sabila, 2026).

Dalam riwayat perkembangan kawasan pariwisata Pantai Pangandaran, penataan pantai telah dilakukan beberapa kali, namun sering kali menghadapi kendala keberhasilan yang salah satunya dipicu oleh faktor bencana alam. Oleh sebab itu, penanggulangan bencana perlu dilakukan secara terencana melalui tahapan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar kondisi masyarakat dan lingkungan dapat kembali normal. Dalam bingkai Perspektif Sosio-Historis yang dikemukakan oleh Robert H. Lauer, setiap masyarakat memiliki titik-titik balik (*turning points*) di mana struktur sosial, tata ruang, dan sistem makna yang selama ini mapan mengalami diskontinuitas dan kemudian direkonstruksi dalam bentuk yang baru. Sebelum tahun 2025, Pantai Parkit berfungsi sebagai ruang publik inklusif dengan estetika visual yang relatif stabil: garis pantai yang jelas, fasilitas umum yang terawat, serta pola aktivitas rekreasi yang teratur sebagaimana lazimnya kawasan wisata pesisir perkotaan. Namun, bencana galodo telah menghancurkan fondasi fisik sekaligus merusak memori kolektif yang melekat pada ruang tersebut. Kerusakan fasilitas umum, perubahan drastis tata ruang, serta menurunnya kualitas lingkungan secara visual sebagaimana diungkapkan oleh informan Muhammad Alfareza yang menyatakan bahwa kondisi pantai menjadi jauh lebih kotor dengan tumpukan kayu dan sampah plastik, merupakan bukti empiris dari apa yang Lauer sebut sebagai discontinuity dalam sejarah lokal. Yang menarik secara sosiologis adalah bahwa disrupsi historis ini tidak hanya melahirkan kehancuran, tetapi juga membuka ruang bagi kemunculan formasi sosial dan estetika baru yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Terbentuknya pulau baru di tengah laut akibat sedimentasi ekstrem, sebagaimana dijelaskan oleh Purba selaku pelaku UMKM, serta perubahan garis pantai yang drastis, telah menciptakan lanskap geomorfologis yang sama sekali berbeda dari periode sebelumnya. Dengan demikian, sejarah Pantai Parkit pasca 2025 bukanlah sekadar kelanjutan linear dari masa lalunya, melainkan sebuah babak baru yang ditandai oleh konfigurasi spasial yang tidak pernah ada sebelumnya serta relasi sosial-ekonomi yang bersifat adaptif terhadap lanskap yang telah berubah total.

Dinamika dialektis antara kehancuran dan kreativitas sosial ini dapat dijelaskan secara lebih tajam melalui Konsep *Challenge and Response* dari Arnold Toynbee. Toynbee, dalam magnum opus-nya *A Study of History*, berargumen bahwa pertumbuhan peradaban dan ketahanan komunitas tidak lahir dari kondisi yang mudah dan stabil, melainkan dari kemampuan mereka merespons secara kreatif terhadap tantangan-tantangan eksistensial yang muncul dari lingkungan, baik yang bersifat alamiah maupun sosial. Di Pantai Parkit, banjir tahun 2025 dengan segala dampaknya kerusakan fasilitas, penurunan kenyamanan, berkurangnya aktivitas wisata, serta degradasi estetika visual akibat sampah dan kayu terdampar merupakan *Challenge* dalam bentuknya yang paling ekstrem. Tantangan ini mengancam tidak hanya fungsi fisik ruang publik, tetapi juga mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada aktivitas wisata dan perdagangan informal di kawasan tersebut. Namun, temuan penelitian ini secara gamblang menunjukkan bahwa *Response* masyarakat tidak bersifat pasif, fatalistik, atau sekadar bertahan (*survival*). Sebaliknya, respons yang muncul justru bersifat adaptif, inovatif, dan transformatif. Kemunculan pulau baru di tengah laut yang secara geofisik adalah konsekuensi langsung dari sedimentasi pascabencana telah dibaca oleh masyarakat sebagai peluang, bukan sekadar anomali atau sisa kerusakan. Fenomena air surut yang memungkinkan pengunjung berjalan kaki menyeberangi laut dangkal menuju pulau tersebut kemudian direspons dengan penciptaan aktivitas rekreasi baru yang belum pernah ada sebelumnya, sebagaimana diungkapkan oleh kelompok pengunjung muda Novia, Nadia, dan Ella yang melihat adanya "plus minus" dari perubahan tersebut. Lebih jauh lagi, respons masyarakat diwujudkan dalam bentuk mobilisasi ekonomi oleh para pelaku UMKM, seperti yang dilakukan Purba yang meningkatkan promosi dagangannya untuk menjangkau pengunjung baru yang datang karena penasaran dengan pulau tersebut. Dalam kerangka Toynbee, keberhasilan respons ini tidak hanya diukur dari kemampuan masyarakat untuk bertahan menghadapi bencana, tetapi dari kemampuan mereka untuk menciptakan bentuk-bentuk kehidupan sosial dan ekonomi baru yang bahkan lebih dinamis dibandingkan periode sebelum bencana. Pantai Parkit pascabanjir 2025 dengan demikian menjadi laboratorium sosial empiris di mana tantangan alam tidak melumpuhkan komunitas, melainkan justru melahirkan inovasi kultural, redefinisi estetika, serta strategi adaptasi ekonomi yang tidak terduga sebelumnya.

Proses adaptasi kolektif yang berhasil ini tidak dapat dipahami secara utuh tanpa menggunakan Teori Struktural-Fungsional, yang menekankan bahwa setiap sistem sosial senantiasa berusaha mempertahankan keseimbangan (*equilibrium*) di tengah berbagai gangguan eksternal maupun internal. Bencana banjir 2025, dalam perspektif ini, merupakan sebuah *dysfunction* atau disfungsi masif yang merusak integrasi struktural antara elemen-elemen sistem sosial di Pantai Parkit. Kerusakan fasilitas umum menyebabkan menurunnya

kenyamanan dan mengganggu fungsi rekreasi ruang publik. Berkurangnya aktivitas wisata pada awal pascabencana mengganggu aliran pendapatan pelaku UMKM yang selama ini bergantung pada kunjungan harian. Perubahan tata ruang yang drastis, termasuk tumpukan kayu dan sampah yang berserakan, menciptakan ketidakpastian makna dan mengganggu estetika visual yang selama ini menjadi daya tarik utama kawasan. Dengan kata lain, subsistem ekonomi, subsistem rekreasi, dan subsistem simbolik yang sebelumnya berjalan secara harmonis dan saling mendukung tiba-tiba mengalami *strain* atau ketegangan struktural yang signifikan. Namun, justru dalam kondisi anomik inilah mekanisme adaptasi struktural bekerja paling intensif. Masyarakat lokal, pengunjung, dan pelaku UMKM tidak menunggu intervensi pemerintah atau bantuan eksternal untuk memulihkan keseimbangan; mereka secara kolektif dan mandiri melakukan serangkaian tindakan adaptif yang secara fungsional berusaha mengembalikan integrasi sistem sosial. Pulau baru yang terbentuk secara alami, misalnya, secara fungsional telah menggantikan peran estetika dan rekreatif dari fasilitas-fasilitas yang rusak. Ia menawarkan daya tarik visual baru yang unik yaitu pengalaman berjalan di tengah laut dan berfoto dengan latar pulau yang bahkan tidak tersedia sebelum bencana. Temuan penelitian tentang meningkatnya kunjungan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Padang, menunjukkan bahwa fungsi rekreasi ruang publik berhasil dipulihkan melalui modalitas baru. Secara bersamaan, pelaku UMKM seperti Purba merespons peningkatan arus pengunjung dengan strategi promosi yang lebih agresif, sehingga subsistem ekonomi yang sempat terhenti mulai berdenyut kembali. Bahkan, konflik yang muncul atas kepemilikan kayu-kayu terdampar, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Alfareza tentang adanya klaim kepemilikan informal dari masyarakat setempat, dapat dibaca sebagai upaya pembentukan aturan-aturan baru dalam pemanfaatan sumber daya pascabencana sebuah proses yang dalam teori struktural-fungsional merupakan bagian dari adaptasi normatif menuju equilibrium baru. Dengan demikian, meskipun bentuk fisik ruang telah berubah secara radikal dan estetika visualnya mengalami ambivalensi (antara daya tarik pulau baru dan gangguan sampah serta kayu), fungsi-fungsi dasar ruang publik sebagai tempat rekreasi, interaksi sosial, dan aktivitas ekonomi berhasil dipulihkan melalui serangkaian adaptasi struktural yang bersifat *emergent* (muncul secara spontan dari bawah). Equilibrium baru yang terbentuk pascabencana tentu tidak identik dengan keseimbangan sebelumnya; ia adalah keseimbangan yang lebih dinamis, ditandai oleh kesadaran akan kerentanan yang lebih tinggi, tetapi juga oleh kapasitas adaptif kolektif yang lebih terasah dan tangguh.

Implikasi teoretis dan praktis dari pembahasan ini sangatlah signifikan bagi pengembangan ilmu sosiologi bencana serta bagi perumusan kebijakan publik di Kota Padang. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah sosiologi bencana dengan menunjukkan bahwa ketahanan (*resilience*) komunitas pesisir tidak semata-mata diukur dari kemampuan mereka untuk "kembali seperti sedia kala" (*bouncing back*), melainkan dari kemampuan mereka untuk bertransformasi ke dalam kondisi sosial-ekologis yang baru dan bahkan lebih adaptif. Temuan ini sejalan dengan studi [Rahmadani, Arifin & Rahman \(2024\)](#) tentang pengetahuan lokal masyarakat Sumatera Barat yang merespons bencana melalui mitigasi kultural, tetapi sekaligus memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa respons masyarakat Pantai Parkit bergeser dari ranah simbolik-ritualistik ke ranah praktis-spasial dan ekonomi. Sementara itu, berbeda dengan studi [Dafrina & Susilo \(2012\)](#) tentang perubahan permukiman pascatsunami di Aceh yang sangat ditentukan oleh intervensi eksternal berupa bantuan rekonstruksi formal, transformasi di Pantai Parkit justru bersifat organik dan bottom-up, tanpa desain besar dari pemerintah atau donor. Perbedaan ini penting karena menunjukkan bahwa resiliensi komunitas tidak selalu bergantung pada bantuan eksternal; masyarakat mampu menciptakan tatanan sosial baru dari sumber daya yang tersedia di lokasi, termasuk dari material banjir itu sendiri seperti kayu-kayu terdampar yang kemudian diusulkan oleh informan untuk dimanfaatkan sebagai tempat duduk atau pembatas. Hal ini memperkuat argumen [Gunawan, \(2023\)](#) tentang peran aktif masyarakat pesisir dalam membangun ketahanan pascabencana, sekaligus memberikan kritik implisit terhadap model penanggulangan bencana yang terlalu teknokratik dan top-down. Secara praktis, temuan ini memberikan pesan mendesak bagi Pemerintah Kota Padang dan pemangku kepentingan terkait. Pertama, upaya pemulihan pascabencana tidak dapat dilakukan dengan pendekatan teknis semata yang hanya fokus pada pembersihan sampah dan rekonstruksi fisik fasilitas secara parsial. Pemerintah harus membaca secara cermat bahwa makna ruang publik telah berubah di mata masyarakat, sebagaimana tercermin dari harapan informan Muhammad Alfareza yang menginginkan kayu-kayu dimanfaatkan menjadi tempat dukan daripada sekadar ditumpuk, serta harapan Simon agar masyarakat lokal diberikan kesempatan mengembangkan usaha kecil tanpa dominasi modal besar. Kedua, pulau baru yang terbuka secara alami, aktivitas berjalan di tengah laut saat air surut, serta konflik kepemilikan kayu terdampar adalah realitas sosial baru yang harus dikelola secara partisipatif. Penataan kawasan Pantai Parkit ke depan harus melibatkan masyarakat, pelaku UMKM, dan kelompok pengunjung dalam mendesain ulang ruang publik yang tidak hanya estetis secara visual, tetapi juga inklusif terhadap makna-makna baru yang telah tumbuh dari bawah, serta aman dari risiko keselamatan mengingat aktivitas penyeberangan ke pulau baru dilakukan tanpa pengawasan. [Ayuningtyas \(2025\)](#) menegaskan bahwa pengelolaan ruang dan lingkungan secara

berkelanjutan sangat penting dalam mengurangi risiko bencana di kawasan pesisir. Dalam menghadapi ancaman lingkungan, masyarakat pesisir mengembangkan interpretasi mandiri yang mewujudkan sebagai strategi adaptasi atau pengetahuan lokal (Rahmadani, Arifin & Rahman, 2024). Pemanfaatan ruang publik yang terencana, partisipasi masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara aktivitas manusia dan kelestarian lingkungan dapat meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai ancaman bencana. Pada akhirnya, Pantai Parkit pascabanjir 2025 mengajarkan sebuah kebenaran sosiologis mendasar bahwa ruang publik bukanlah panggung yang statis dan abadi, melainkan entitas yang hidup, yang terus-menerus dinegosiasikan, dimaknai ulang, dan dibangun kembali oleh masyarakat yang menghuninya. Ketika dihadapkan pada guncangan sejarah yang paling dahsyat sekalipun, komunitas pesisir tidak sekadar bertahan, tetapi justru menemukan cara-cara baru untuk hidup, bekerja, dan memaknai ruang mereka sebuah bentuk ketahanan sosial yang sesungguhnya paling otentik dan berkelanjutan.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan banjir galodo tahun 2025 membawa perubahan yang cukup besar terhadap kondisi Pantai Parkit. Perubahan tersebut terlihat dari munculnya tumpukan kayu dan sampah plastik, perubahan garis pantai, serta terbentuknya pulau baru akibat sedimentasi. Kondisi ini memengaruhi cara masyarakat memanfaatkan ruang publik, aktivitas ekonomi pelaku UMKM, serta hubungan sosial masyarakat di sekitar kawasan pantai. Meskipun kondisi lingkungan mengalami penurunan, keberadaan pulau baru justru menarik perhatian pengunjung dan menciptakan aktivitas baru di kawasan tersebut. Selain itu, masyarakat menunjukkan kemampuan beradaptasi melalui berbagai upaya pemanfaatan ruang dan sumber daya yang tersedia, meskipun masih ditemukan kendala berupa konflik kepentingan dalam pemanfaatan material sisa bencana. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam proses pemulihan kawasan pascabencana. Temuan ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menata kembali Pantai Parkit, terutama dalam pengelolaan kebersihan, pemberdayaan UMKM, serta pelibatan masyarakat dalam proses pemulihan dan pengembangan kawasan wisata. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan dalam periode yang relatif singkat setelah bencana dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang perubahan Pantai Parkit, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan, serta menggunakan metode yang lebih beragam agar memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh.

Rujukan

- Arif, M. (2019). Analisis Wilayah Berpotensi Banjir Daerah Sumatera Barat untuk Pelaksanaan Pembelajaran Geografi Berorientasi Bencana Alam. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 4(1), 53–60.
- Atmaja, S.; Arianto, B. & Darmawan, E. (2024). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Karimun Tahun 2023. *JIKMA*, 2(4), 33–45.
- Ayuningtyas, N. M. P. (2025). Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik sebagai Daya Tarik Wisata di Pantai Nyanyi, Tabanan. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 14(3), 149–160.
- Budiman, L. & Akbar, L. M. T. (2023). Pengendalian Bencana Alam Banjir di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(1), 421–430.
- Dafrina, A. & Susilo, A. (2012). Kajian Perubahan Fisik Hunian Pasca Tsunami sebagai Bahagian dari Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana di Aceh. *ARSITEKNO*, 1(1), 26–38.
- Gunawan, H. (2023). Analisis Peran Masyarakat Pesisir terhadap Ketahanan Pasca Bencana Alam di Desa Pesisir. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Ketahanan Pangan (JKPT)*.
- Hardjodijono, R. B. S. (2025). *Mengelola Perubahan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas: Perspektif Sosiologis*. Penerbit Buku Kompas.
- Miles, M. B. Huberman, A. M. & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Nabilah, R. & Sari, R. (2024). Evaluasi Objek Wisata Berdasarkan Preferensi Estetika Scenic Beauty Estimation di Pantai Pasir Putih, Lampung. *REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 19(2), 702–721.
- Nurwarsih, N. W. & Prasandya, K. D. (2022). Pola dan Karakteristik Kualitas Spasial Ruang pada Pantai di Kecamatan Kuta, Bali. *Jurnal Arsitektur TERRACOTTA*, 30–36.
- Oktaviana, R. N. (2026). Evaluasi Pasca Huni Kawasan Revitalisasi Pantai Pengandaran. *Jurnal Rekayasa Konstruksi*, 4(2), 97–111.

-
- Praganingrum, T. I. (2025). *Transformasi Fungsi Tepian Sungai "Tukad Badung" Tinjauan Pola Penggunaan Ruang pada Taman Kumbasari*.
- Prihandono, D. E.; Suyoga, I. P. G.; Pranajaya, I. K. & Arnadwika, N. K. M. R. (2026). *Evaluasi Kesesuaian Estetika dan Aksesibilitas Fasilitas Toilet Umum di Pantai Kuta, Bali*. 248–263.
- Rahmadani, D.; Arifin, Z. & Rahman, F. (2024). Pengetahuan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai dan Mitigasi Bencana di Sumatera Barat. *JuMASI: Jurnal Mahasiswa Antropologi Dan Sosiologi Indonesia*, 64–75.
- Sabila, I. N. (2026). Memaknai Kembali Ruang Alam Sebagai Kesadaran Lingkungan Masyarakat Desa Bermi Pasca Bencana Banjir. *IMPAK: Inovasi Masyarakat Pengabdian Dan Berkelanjutan*, 1(2), 60–65.
- Sagita, S. (2016). Sistem Informasi Geografis Bencana Banjir di Jakarta Selatan. *Faktor Exacta*, 9(4), 366–376.
- Ugrasena, R. S.; Siwalatri, N. K. A. & Prajnawrdhi, T. A. (2020). Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik di Kawasan Pesisir Pantai Berawa. *RUANG: Jurnal Lingkungan Binaan*, 7(2), 187–202.